



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERAN PANWASLU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI DALAM
MENGAWASI PENYELENGGARAAN PILKADA RIAU 2018
BERDASARKAN UU No. 10 TAHUN 2016 TENTANG
PEMILIHAN GUBERNUR BUPATI
DAN WALIKOTA**

SKRIPSI



UIN SUSKA RIAU

OLEH

ARIFIN PITOYO

NIM: 11427103834

JURUSAN ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2020



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi ini dengan judul *"Peran Panwaslu Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pilkada Riau 2018 berdasarkan Undang - Undang No 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota"* yaitu ditulis oleh:

Nama : Arifin Pitoyo
 NIM : 11427103834
 Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam Sidang Munaqasah Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 April 2019

Pembimbing Skripsi

HELLEN LAST FITRIANI SH. MH

NIK: 130217121

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *"PERAN PANWASLU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI DALAM MENGAWASI PENYELENGGARAAN PILKADA RIAU 2018 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR BUPATI DAN WALIKOTA"* yang ditulis oleh :

Nama : Arifin Pitoyo
 NIM : 11427103834
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 10 Maret 2020
 Waktu : 13.30 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Maret 2020 M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Firdaus, SHL, MH

Sekretaris
Muslim, S.Ag.,SHL,M.Hum

Penguji I
Ilham Akbar, SHL,SHL,MH

Penguji II
Dr. H. Abu Samah, MH



Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
 NIP. 19580712 198603 1 005

ABSTRAK

Masalah dalam penelitian ini adalah dalam penyelenggaraan pilkada Riau 2018 panwaslu Kabupaten Kepulauan Meranti dalam menjalankan tugas dan wewenangnya masih belum berjalan dengan baik, karena masih ditemukannya pelanggaran yang terjadi.

Tujuan penulis meneliti masalah diatas adalah, untuk mengetahui peran panwaslu kabupaten kepulauan meranti dalam mengawasi penyelenggaraan pilkada riau 2018 berdasarkan undang-undang No. 10 tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota, dan untuk mengetahui faktor penghambat yang dihadapi oleh panwaslu kabupaten kepulauan meranti dalam mengawasi penyelenggaraan pilkada riau 2018 berdasarkan undang-undang No. 10 tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota.

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian hukum Empiris Sosiologis yaitu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum didalam masyarakat, adapun salah satu objek kajiannya yaitu mengatur peranan lembaga atau institusi hukum dalam penegakan hukum.

Lokasi penelitian dilakukan dikantor panwaslu Kabupaten Kepulauan Meranti, populasi dalam penelitian ini sebanyak 16 orang, sedangkan sampel yang diambil sebanyak 8 orang, dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yakni teknik pengambilan secara sengaja dan langsung ditentukan oleh peneliti dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian. teknik pengumpulan data dengan observasi dilanjutkan dengan wawancara, dengan menggunakan metode analisis data deskriptis kualitatif, yaitu menjelaskan secara rinci sehingga tergambar secara utuh dan dapat dipahami, diperoleh melalui observasi lapangan, dilanjutkan dengan wawancara, dan ditarik kesimpulan pada akhirnya.

Berdasarkan hasil penelitian, peran panwaslu Kabupaten Kepulauan Meranti dalam mengawasi penyelenggaraan pilkada Riau 2018 melaksanakan pengawasan berkordinasi secara struktural dengan menerima laporan pelanggaran, mengawasi jalanya pilkada dengan berkoordinasi bersama KPU, menindak pelanggaran dan hanya berwenang merekomendasikan pelanggaran tersebut. tetapi dalam perakteknya belum berjalan dengan maksimal, disebabkan oleh lemahnya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, dan terkesan saling salah menyalahkan antara satu dengan yang lainnya. sedangkan faktor penghambat yang dihadapi panwaslu Kabupaten Kepulauan Meranti, berupa lemahnya aturan peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia, terbatasnya anggaran pembiayaan, keadaan geografi dan sarana penunjang kerja, serta kurangnya kesadaran dari pemilih dan peserta pilkada.

Kesimpulan pada akhirnya adalah peran panwaslu Kabupaten Kepulauan Meranti dalam mengawasi penyelenggaraan pilkada Riau 2018 berdasarkan Undang-undang No. 10 tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota adalah melaksanakan pengawasan hanya secara administrasi, sedangkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tugas dan wewenang panwaslu memiliki hak pengawasan yang luas meliputi pengendalian keseluruhan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirobil`alamin sedalam syukur dan setinggi puji penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat serta taufik dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Shalawat dan salam tidak lupa juga penulis doakan semoga senantiasa Allah limpahkan kepada Nabiullah Habibullah junjungan alam baginda Nabi kita Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari alam jahiliyah kepada alam yang terang menderang yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Dengan izin dan rahmat Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Peran Panwaslu Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pilkada Riau 2018 berdasarkan Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota”** merupakan karya ilmiah yang disusun untuk memenuhi sebagai persyaratan untuk mencapai gelar sarjana hukum (SH) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membimbing dan mendukung peneliti baik dengan moral maupun materil selama berlangsungnya penyusunan skripsi ini, kemudian dari pada itu Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayahanda Bambang Supriadi dan Ibunda Nelmida serta Adinda Arya Adi Prasetyo yang senantiasa mencurahkan kasih sayang, semangat, memperjuangkan dan untaian doa yang terus mengalir kepada penulis, memberikan dukungan baik moril dan materil dalam memfasilitasi kebutuhan perkuliahan, serta untuk keluargaku dan teman seperjuangan yang selalu memberikan motifasi kepada penulis.

Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag. M.Ag selaku rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

4. Bapak Firdaus, SH.MH, selaku ketua jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

5. Ibu Hellen Last Fitriani, SH. MH selaku pembimbing yang telah memberikan waktu, ilmu, motifasi dan bimbingan kepada penulis dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam menyelesaikan Sekripsi.

Bapak Firdaus, SH.MH, selaku penasehat Akademik (PA) yang telah membimbing dan mengarahkan untuk menyelesaikan skripsi ini.

Bapak-bapak, Ibu-ibu dosen, dan segenap civitas akademika yang telah memberikan jasa dan menyediakan waktu pada Penulis dalam semua urusan di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan yang telah diberikan, selaku Penulis, mohon maaf apabila terdapat kekurangan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan kesalahan dalam kata pengantar yang Penulis persembahkan baik dari segi kata bahasa maupun secara etimologis. Mudah-mudahan penelitian ini bermanfaat dan memperkaya ilmu bagi kalangan pembaca.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 10 Maret 2020

Penulis

ARIFIN PITOYO

NIM. 11427103834

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Terbentuknya Kabupaten Kepulauan Meranti	16
B. Sejarah Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Kepulauan Meranti	19
C. Visi dan Misi Panwaslu Kabupaten Kepulauan Meranti ...	21
D. Struktur Organisasi Panwaslu Kabupaten Kepulauan Meranti	23
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	
A. Negara Hukum dan Demokrasi	24
B. Pemerintahan Daerah dan Pemilihan Kepala Daerah	27
C. Pentingnya Peranan dan Pengawasan	37
D. Tinjauan Umum tentang Panitia Pengawas Pemilu	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Peran Panwaslu Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pilkada Riau 2018 Berdasarkan Undang-undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota	46



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

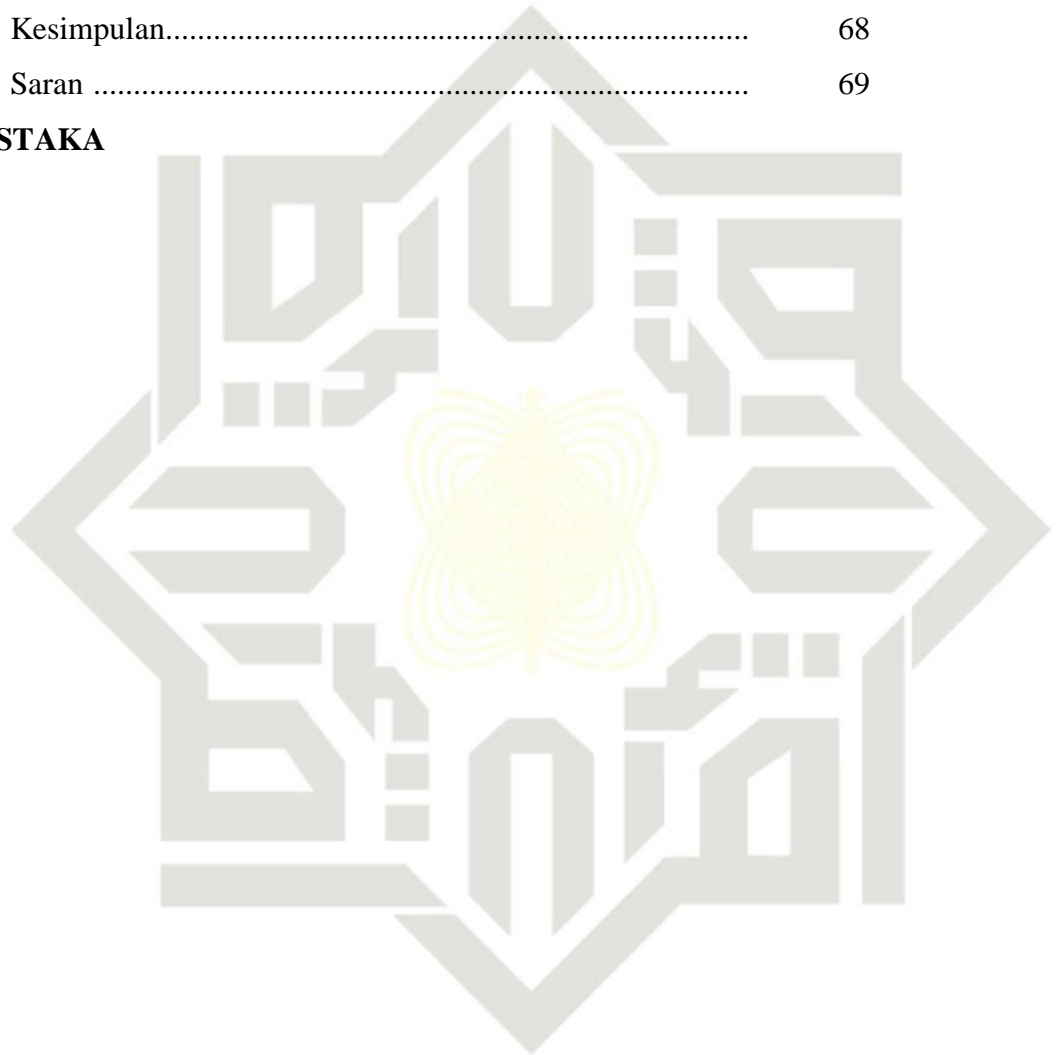
B. Faktor Penghambat Panwaslu Kabupaten Kepulauan Meranti dalam mengawasi Penyelenggaraan pilkada Riau 2018 Berdasarkan Undang-undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota	59
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	68
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Populasi dan Sampel	12
Tabel II.1	Penyebaran Penduduk Disetiap Kecamatan	18
Tabel IV.1	Rekapitulasi Data Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018 Kabupaten Kepulauan Meranti.....	55
Tabel IV.2	Hasil Pleno Tingkat Kabupaten Kepulauan Meranti 5 Juli 2018	57

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang berasaskan Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum (sumber tertib hukum) yang terdapat didalam pembukaan UUD 1945,¹ sebagai dasar negara, Pancasila merupakan suatu asas dasar filsafat Negara (*Phylosofische Grondslag*), dalam kedudukan ini Pancasila merupakan sumber nilai dan sumber norma dalam setiap aspek penyelenggaraan Negara, termasuk sebagai sumber tertib hukum negara republik Indonesia, konsekuensinya seluruh peraturan perundang-undangan serta penjabarannya senantiasa berdasarkan nilai-nilai yang terkandung didalam sila-sila Pancasila,² negara Indonesia adalah negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum, segala aspek dalam pelaksanaannya dan penyelenggaraan negara diatur dalam suatu sistem peraturan perundang-undangan,³

Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang berisi norma-norma hukum yang mengikat untuk umum baik yang ditetapkan oleh legislator atau lembaga-lembaga pelaksana undang-undang yang mendapatkan kemenangan delegasi dari undang-undang yang berlaku, undang-undang merupakan bentuk hukum paling tertinggi statusnya dibawah undang-undang dasar, sebagai produk hukum undang-undang baru mengikat untuk umum

¹ Firdaus, *Pancasila*, (Riau : Suska Perss, 2010), h. 5

² Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, (Yogyakarta : Paradogma, 2010), h.147

³ *Ibid*, h.148

Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu pada saat di undangkan (*meneverbindende vourschifen*),⁴ menurut PJP Talk, undang-undang dalam artian formil dan materil adalah pemerintah bersama dengan parlemen mengambil keputusan dalam membuat undang-undang, jika suatu lembaga yang mempunyai kemenangan membentuk peraturan perundang-undangan dan mengeluarkan suatu keputusan yang mengikat masyarakat umum.⁵

Terdapat kolerasi yang jelas antara negara hukum yang bertumpu pada konstitusi dengan kedaulatan rakyat, yang dijalankan melalui system demokrasi, dalam sistem demokrasi, parstisipasi rakyat merupakan esensi dari sistem ini, dengan kata lain, negara hukum harus ditopang dengan system demokrasi, menurut Frans Magnissuseno, “negara demokrasi dalam arti yang sesungguhnya, demokrasi merupakan cara paling aman untuk mempertahankan kontrol atas Negara hukum”. Misalnya dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 2-3 mencantumkan kedua konsep sebagai sebuah model bentuk dan kedaulatannya negara, hal ini ditempatkan pada bagian awal pembukaan awal UUD 1945.⁶

Arti demokrasi (umum), istilah demokrasi berasal pada dua kata yunani, yaitu *demos* artinya rakyat, dan *kratia* artinya pemeritahan, jadi demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat untuk rakyat atau pemerintahan oleh mereka yang diprintah,⁷ maka dalam artian demokrasi itu termasuk cara

⁴JimlyAssadiqi, *Pengantar Hukum Tata Negara*, (Jakarta : Sekeretariat Jendral Dan Kepaniteraan MK, 2006), h.202-205

⁵JimlyAshadiqi, *PerihalUndang-Undang*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2012), h. 83

⁶ Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi Diindonesia*, (Yogyakarta : pustaka pelajar, 2011), h. 161

⁷*Ibid*, h.174

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah dimana golongan yang memerintah dan diperintah itu adalah sama tidak terpisah, artinya satu sistem pemerintahan negara dalam pokoknya semua orang (rakyat) adalah sama untuk memerintah dan juga diperintah, adapun demokrasi konstitusional bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintahan yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya, kekuasaan negara dibagi sedemikian rupa sehingga kesempatan penyalahgunaan diperkecil, yaitu dengan cara menyerahkannya kepada beberapa orang atau badan yang tidak memusatkan kekuasaan pemerintahan dalam satu tangan atau satu badan.⁸ demokrasi ditandai oleh adanya tiga syarat, yaitu, (1) kompetisi didalam memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan, (2) partisipasi masyarakat, dan (3) adanya hak-hak sipil dan politik.⁹

Pada preode ini beberapa regulasai dikeluarkan, ada beberapa peraturan perundang-undangan yang menyangkut lembaga perwakilan dan pemilihan umum, pemilihan umum merupakan instrument penting dalam negara demokrasi yang menganut system perwakilan, pemilu berfungsi sebagai alat penyaring bagi politikus-politikus yang akan mewakili dan membawa suara rakyat didalam lembaga perwakilan tersebut,¹⁰ pemilihan umum juga dapat diartikan sebagai suatu lembaga praktik politik yang memungkinkan untuk terbentuknya suatu pemerintahan perwakilan (*representative government*), atau bisa disebut dengan arena “*political*

⁸ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, (Jakarta : Rajawali Perss, 2010), h.201

⁹ Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia Konsolidasi pasca Orde Baru*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2010), h.83

¹⁰ Mahfud Md, *Politik hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 60

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

market” yang berarti pemilu menjadi tempat individu/masyarakat untuk berinteraksi dan melakukan kontrak sosial dengan para peserta pemilu. Dalam kehidupan berdemokrasi, pemilu merupakan suatu proses yang substansional dalam penyelenggaraan pemerintahan, dikatakan substansional karena pemilu dilakukan secara berkala merupakan suatu sarana untuk meregenerasi kepemimpinan, sehingga dapat mencegah munculnya kepemimpinan yang otoriter. Menurut Rose dan Muossawir adapun fungsi pemilihan umum yaitu, (1) menentukan pemerintahan secara langsung maupun tidak langsung, (2) sebagai wahana umpan balik antara pemilik suara dan pemerintah, (3) barometer dukungan rakyat terhadap penguasa, (4) sarana rekrutmen politik, dan (5) alat untuk mempertajam kepekaan pemerintah terhadap tuntutan rakyat.¹¹

Penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden 2004 secara langsung telah mengilhami dilaksanakannya pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) secara langsung pula, hal ini didukung dengan semangat otonomi daerah yang telah digulirkan pada tahun 1999, pilkada masuk dalam rezim pemilu setelah disahkannya undang-undang No 22 tahun 2007 tentang penyelenggara pemilihan umum sehingga sampai saat ini pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah lebih dikenal dengan istilah pilukada, pada tahun 2008, tepatnya setelah diberlakukannya undang-undang No. 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. pemilu gubernur dan wakil gubernur

¹¹ Muhaddam Izbolo Dan Teguh Ilham, *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Perss, 2015), h. 50-53

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diselenggarakan oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten kota.¹² sejalan dengan penguatan demokrasi melalui amandemen UUD 1945, pada Tahun 2014 sistem pemilihan ini kembali berubah dari sistem pemilihan melalui DPRD menjadi sistem pemilihan langsung, melalui undang-undang nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, sistem pemilihan langsung ini sempat dikoreksi lalu dikembalikan kepada mekanisme pemilihan di DPRD, meski kemudian karena protes dan desakan publik juga dukungan penuh dari DPD RI yang memang sejak awal mendukung Pemilihan Kepala Daerah secara langsung akhirnya pembuat undang-undang kembali menetapkan mekanisme pilkada secara langsung melalui undang - undang No 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang No 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang No 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubenur, bupati, dan walikota.¹³

Potensi masalah dalam penyelenggaraan pilkada serentak meliputi efektifitas dan efesiensi anggaran, ancaman mony politik dan black kampanye yang masif.¹⁴ dalam undang-undang No 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum secara langsung pelanggaran pemilu dikategorikn menjadi 6 diantaranya, pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu, yaitu pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilu yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji penyelenggara pemilu, pelanggaran administrasi pemilu, yaitu pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur,dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksana pemilu yang berkaitan dengan

¹² *Ibid*, h.174-175

¹³ Herry Febriadi, *A'adl*, (Jurnal Volume X No 1, Januari 2018), h. 44

¹⁴ *Ibid*, h. 308

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

alat peraga kampanye, sengketa pemilu, yaitu sengketa yang terjadi antar peserta pemilu, tindak pidana pemilu, yaitu tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran dan kejahatan selama berlangsungnya pemilu, sengketa tata usaha Negara pemilu, yaitu, sengketa yang timbul antara penyelenggara pemilu dengan peserta pemilu, perselisihan hasil pemilu, yaitu perselisihan antara KPU dengan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu.¹⁵

Praktek penyelenggaraan pilkada secara langsung di Indonesia selama ini, penyelenggaraan pemilu kerap memunculkan masalah penegakan hukum. disebabkan tidak lain karena peluang untuk terjadinya pelanggaran sangat terbuka, baik pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, peserta pemilu (partai politik, pasangan calon, maupun perseorangan), tim kampanye, pemerintah, pemilih, serta masyarakat umum sebagaimana disebutkan dalam Perbawaslu No. 13 tahun 2012 tentang tata cara Pengawasan Pemilu. Pada saat era reformasi, tuntutan untuk pemilu yang jujur dan adil semakin tinggi, dibuktikan dengan semakin kuatnya legal formal pembentukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di tingkat Pusat, di tingkat Provinsi sampai Pembentukan Panitia Pengawasan Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota yang *ad hoc*, Namun demikian, panwaslu sebagai badan formal yang bertugas untuk mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu, masih mengalami berbagai kendala pengawasan.¹⁶

¹⁵ Yatarullah, *Sistem Pemilu*, (Pekanbaru : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2015), h. 60-68

¹⁶ Ratnia Sholihah Dkk, *Jurnal Wacana Politik*, (Volume 3, No 1 Maret 2018 : 14-28), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemilihan kepala daerah serentak putaran terakhir, 27 juni 2018 di provinsi riau, panitia pengawas pemilu (panwaslu) Kabupaten Kepulauan Meranti menyampaikan hasil pengawasan temuan selama perhelatan pilkada riau 2018 disampaikan saat pleno tingkat kabupaten, tanggal 5 juli 2018, pelanggaran yang ditemukan diantaranya, pelanggaran adminitrasi daftar pemilih, pelanggaran kelalaian petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara, pelanggaran berita acara pemungutan dan penghitungan surat suara, pelanggaran logistik surat suara, pelanggaran oleh kelompok penyelenggara pemungutan suara yang tidak menunjukan surat tugas, dan pelanggaran *tupoksi* (tugas pokok dan fungsi) terhadap jajaran penyelenggara pilkada. adapun tugas dan wewenang panwaslu adalah, mengawasi pelaksanaan setiap tahapan pemilu dan menangani temuan pelanggaran adminitrasi pemilu, dan menyelesaikan sengketa dalam penyelenggaraan pemilu.

Dengan demikian sangat menarik jika ditelaah lebih lanjut terhadap pelanggaran-pelanggaran hasil pleno diatas, salah satunya penulis ambil yaitu pelanggaran kelalaian petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara, dapat juga disebut dengan KPPS. berdasarkan pasal 21 undang-undang No. 10 tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, ayat (1) anggota KPPS berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS, ayat (1a) seleksi penerimaan anggota KPPS dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas dan integritas dan kemandirian calon anggota KPPS, ayat (2) anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama ketua KPU Kabupaten/Kota,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan ayat (4) susunan keanggotaan terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota.

Penyelenggaraan pilkada serentak yang dilaksanakan secara bertahap mulai pada 2015, kemudian tahap kedua dilaksanakan pada 15 februari 2017, untuk kepala daerah yang masa jabatannya pada semester kedua 2016 dan yang berakhir pada 2017, selanjutnya, secara bertahap gelombang ketiga dilaksanakan pada juni 2018, hingga pilkada serentak nasional pada tahun 2027 yang meliputi seluruh wilayah Indonesia. meskipun demikian, dalam praktiknya, pilkada melahirkan berbagai konflik, diantaranya di picuakan masalah, administrasi data pemilih, netralitas penyelenggara pemilu, serta kurangnya kepatuhan peserta pilkada dan peserta politik terhadap peraturan yang berlaku,¹⁷ pemilihan kepala daerah serentak putaran terakhir, 27 juni 2018 di provinsi Riau, panitia pengawas pemilu (panwaslu) Kabupaten Kepulauan Meranti menyampaikan hasil pengawasan dan temuan selama perhelatan pilkada riau 2018 di sampaikan saat pleno tingkat kabupaten, tanggal 5 juli 2018 terdapat beberapa pelanggaran yaitu pelanggaran administrasi.

Dalam undang-undang No. 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubenur, bupati dan walikota, pasal 30 ayat 1, tugas dan wewenang panwaslu kabupaten kota yaitu, melaksanakan pengawasan rekrutmen PPK (panitia pemilihan

¹⁷ Achmad Arifullah, *Pelaksanaan Pilkada Serentak Yang Demokrasi Damai Dan Bermartabat*, (Jurnal Volume I, No 2 mei-Agustus 2005), h. 302

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kecamatan), PPS (panitia pemungutan suara), dan KPPS (kelompok penyelenggara pemungutan suara).¹⁸

Dari uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul : **Peran Panwaslu Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pilkada Riau 2018 Berdasarkan Undang-undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Wali Kota.**

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari pemahaman serta penafsiran yang keliru serta untuk memberikan arahan dalam penelitian ini, maka perlu kiranya penulis memberikan batasan dalam penelitian ini yaitu khusus membahas peran panwaslu kabupaten kepulauan meranti dalam mengawasi penyelenggaraan pilkada riau 2018 berdasarkan undang-undang No. 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur bupati dan walikota.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana peran panwaslu kabupaten kepulauan meranti dalam mengawasi penyelenggaraan pilkada riau 2018 berdasarkan undang-undang No. 10 tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota ?

¹⁸ Undang-undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubenur, Bupati Dan Walikota

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apa saja yang menjadi kendala dan hambatan panwaslu kabupaten kepulauan meranti dalam mengawasi penyelenggaraan pilkada riau 2018 berdasarkan Undang-undang No. 10 tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota ?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka maksud dari tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui peran panwaslu kabupaten kepulauan meranti dalam mengawasi penyelenggaraan pilkada riau 2018 berdasarkan undang-undang No. 10 tahun 2016 tentang pemilihan Gubenur, Bupati dan Walikota.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat yang dihadapi oleh panwaslu kabupaten kepulauan meranti dalam mengawasi penyelenggaraan pilkada riau 2018 berdasarkan undang-undang No. 10 tahun 2016 tentang pemilihan Gubenur,Bupati dan Walikota.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang di harapkan peneliti dari penelitian ini yaitu antara lain :

- a. Secara peraktis diharapkan penelitian ini sebagai masukan bagi panwaslu kabupaten kepulauan meranti dalam penyelenggaraan pilkada lebih meningkatkan kinerjanya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran upaya bagi panwaslu kabupaten kepulauan meranti dalam menjalankan perundang-undangan.
- c. Sebagai bahan pertimbangan masukan bagi penulis dari hasil penelitian ini dan juga dapat di jadikan bahan pertimbangan bagi peneliti lain yang ingin meneliti lebih lanjut.

Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian yang berfungsi untuk mengetahui suatu masalah yang akan diteliti.maka peneliti telah menerapkan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Empiris Sosiologis yaitu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum didalam masyarakat, adapun salah satu objek kajiannya adalah dalam mengatur peranan lembaga atau institusi hukum dalam penegakan hukum, pendekatan dalam penelitian hukum Empiris berfokus pada perilaku (*behavior*) yang berkembang dalam masyarakat, atau bekerjanya hukum dalam masyarakat, hukum dikonsepskan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) yang meliputi perbuatan dan akibatnya dalam hubungan hidup bermasyarakat.¹⁹ dengan maksud menjelaskan secara jelas tentang peran Panwaslu Kabupaten Kepulauan Meranti dalam mengawasi penyelenggaraan pilkada riau 2018 berdasarkan undang-undang No. 10 tahun 2018 tentang pemilihan gubernur bupati dan walikota.

¹⁹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, (Bandung : Alfabeta Bandung, 2017), h. 70

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Populasi dan Sampel

Populasi adalah merupakan sekelompok orang-orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian, sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya.²⁰ adapun yang menjadi populasi adalah 1 ketua panwaslu kabupaten kepulauan meranti, 14 staf panwaslu Kabupaten Kepulauan meranti, dan 1 kordinator Devisi pencegahan hubungan dan antar lembaga panwaslu Kabupaten Kepulauan Meranti. dari jumlah populasi tersebut sampel yang diambil yaitu 8 orang. dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yakni teknik pengambilan secara sengaja dan langsung ditentukan oleh peneliti dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Tabel I.1
Populasi dan Sampel

No	Sub populasi	Populasi	Sampel	Presentase
1	Ketua Panwaslu	1	1	100%
2	Staf Panwaslu	14	6	43%
3	Kodif pencegahan dan hubungan antar lembaga	1	1	100%
	Jumlah	16	8	50%

3. Sumber Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian

²⁰ *Ibid*, h. 72

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.²¹ yaitu wawancara dengan ketua dan staf Panwaslu Kabupaten Kepulauan Meranti.

- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis yang dapat memperkaya data primer, berupa tabel, catatan, notulen yang terkait penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Observasi

Adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian, pengamat harus jeli dalam mengamati, menatap kejadian, gerak atau proses yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan akan terjadi, dan berdasarkan referensi yang berkaitan dengan persoalan yang akan diteliti.

b. Wawancara

Adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada peneliti.²²

c. Studi Pustaka

²¹ Sandu Siyoto dan Adi Sodik, *Dasar Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Literasi Media Publishing, 2015), h. 28

²² Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2004), h. 64

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adalah memperoleh data yang berhubungan dengan masalah penelitian dan hasil pemikiran-pemikiran secara teori dalam penelitian.

5. Analisis Data

Metode yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah dengan metode analisis Deskriptis Kualitatif, yaitu setelah semua sumber data berhasil dikumpulkan maka penulis akan menjelaskan secara rinci sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas pada kesimpulan akhirnya yang diperoleh melalui wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus, atau observasi yang telah dituangkan dalam catatan lapangan (transkrip) dan bentuk lain.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang akan di sajikan dalam penelitian ini terdiri dari bab pertama sampai bab kelima, yaitu yang terdiri dari :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan menguraikan antara lain :

- A. Latar belakang masalah
- B. Batasan masalah
- C. Rumusan masalah
- D. Tujuan penulisan dan manfaat penulisan
- E. Metode penelitian
- F. Sistematika penulisan

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini akan menguraikan tentang :

- A. Sejarah Kabupaten Kepulauan Meranti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- B. Sejarah dan profil kantor serta struktur organisasi panwaslu Kabupaten Kepulauan Meranti

BAB III : TINJAUAN TEORI

Dalam bab ini di tuangkan mengenai tinjauan tentang teori tentang :

- A. Pemerintahan daerah
- B. Pemilihan kepala daerah
- C. Pentingnya peranan dan pengawasan
- D. Tinjauan umum tentang panitia pengawas pemilu

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan di tuangkan pembahasan tentang :

- A. Peran panwaslu Kabupaten Kepulauan Meranti dalam mengawasi penyelenggaraan Pilkada Riau 2018 berdasarkan Undang-undang No. 10 tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota.
- B. Faktor penghambat Panwaslu Kabupaten Kepulauan Meranti dalam mengawasi penyelenggaraan Pilkada Riau 2018 berdasarkan Undang-undang No. 10 tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisikan :

- A. Kesimpulan dari hasil penelitian
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Terbentuknya Kabupaten Kepulauan Meranti

Kabupaten Kepulauan Meranti adalah salah satu Kabupaten termuda di Provinsi Riau, Indonesia, dengan ibu kotanya Selatpanjang. Kabupaten Kepulauan Meranti terdiri dari sembilan kecamatan yaitu, Kecamatan Tebing Tinggi, Tebing Tinggi Barat, Rangsang, Rangsang Barat, Rangsang Pesisir, Pulau Merbau, Merbau, Tasik Putri Puyu, dan Tebing Tinggi Timur. Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan pemekaran dari Kabupaten Bengkalis dibentuk pada tanggal 19 Desember 2008.

dasar hukum berdirinya Kabupaten Kepulauan Meranti adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 Tanggal 16 Januari 2009, Tuntutan pemekaran Kabupaten Kepulauan Meranti sudah diperjuangkan oleh masyarakat Meranti sejak tahun 1997, seruan pemekaran kembali dihembuskan oleh masyarakat pada tahun 1970 dan tahun 1990-an hingga tahun 2008, yang merupakan satu-satunya kawedanan Riau yang belum dimekarkan saat itu, dengan perjuangan gigih sejumlah tokoh masyarakat meranti maka pada tanggal 25 Juli 2005 dibentuklah Badan Perjuangan Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti (BP2KM) Sebagai wadah aspirasi masyarakat Meranti untuk memekarkan diri dari Kabupaten Bengkalis. Dengan memperhatikan aspirasi masyarakat tersebut maka dituang dalam keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 05/KPTS/P/DPRD/1999/2000 tanggal 17 Juni tahun 1999

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang Persetujuan terhadap pemekaran Wilayah Kabupaten Bengkalis, Surat Bupati Bengkalis Nomor 135/TP/876 tanggal 17 Juni 1999, perihal dukungan terhadap pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti, keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Nomor 16/KPTS/DPRD/2008 Tanggal 11 Juli 2008, Surat Gubernur Provinsi Riau Nomor 1396/IX/2008 Tanggal 19 September 2008 tentang Persetujuan Pemerintah Provinsi terhadap Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti, dan Keputusan Gubernur Provinsi Riau Nomor 100/PH/58.32 tanggal 18 Desember 2008 tentang Persetujuan Pemerintah Provinsi Riau terhadap Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti.²³

1. Gambaran Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Terkini

Secara umum kabupaten kepulauan meranti beriklim tropis dengan suhu udara antara 25⁰-32⁰ Celcius, dengan kelembapan dan curah hujan sangat tinggi, kabupaten kepulauan meranti sebagian besar terdiri dari daratan rendah dan perpulau, struktur tanah terdiri dari tanah alluvial dan gray humus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah dan berhutan bakau (mangrove), karakteristik tanah dengan kedalaman salum cukup dalam dan bergambut, bertopografi datar dengan kelerengan 0-8% dan ketinggian rata-rata 1-6,4 m diatas permukaan laut.

Kabupaten kepulauan meranti berada pada kordinat 0⁰42'30"-1⁰28'0"-103⁰10'0" BT, yang terletak pada bagian pesisir timur pulau sumatera, dengan pesisir pantai yang berbatasan dengan sejumlah negara tetangga dan masuk dalam daerah *hinterland* dan kawasan freetrade zone,

²³Sumber Data: Dokumentasi Diambil Dari Kasubag Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, 5 maret 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masuk dalam daerah segitiga pertumbuhan ekonomi (*griwtrigle*) Indonesia, Malaysia, Singapura. Dalam rangka pemanfaatan dan keuntungan posisi geografis maka wilayah kabupaten kepulauan meranti sangat potensial berfungsi sebagai pintu gerbang lintas batas negara atau pintu gerbang internasional melalui jalur laut, sebagai beranda terdepan negara dalam pengembangan pusat niaga dan industry.

Kabupaten kepulauan meranti memiliki luas wilayah 3707,84 km², dengan selatpanjang sebagai ibu kota kabupaten, jumlah penduduk kabupaten kepulauan meranti berdasarkan hasil registrasi penduduk tahun 2017 berjumlah 10,299 jiwa, terdiri dari 5,234 penduduk laki-laki dan 5,06 jiwa penduduk perempuan. Perbatasan-perbatasan wilayah kabupaten kepulauan meranti :

Sebelah Utara : Selat malaka

Sebelah Selatan : Kabupaten siak dan kabupaten pelalawan

Sebelah Barat : Kabupaten karimun provinsi kepulauan riau

Sebelah Timur : Kabupaten bengkalis

Tabel II.1
Penyebaran Penduduk Disetiap Kecamatan

No	Nama Kecamatan	Luas Wilayah	Jumlah Penduduk
1	Tebing Tinggi Barat	586.83 km	15 916
2	Tebing Tinggi	849.50 km	56 540
3	Tebing Tinggi Timur	768.00 km	11 811
4	Rangsang	681.00 km	18 647
5	Rangsang Pesisir	371.14 km	17 075
6	Rangsang Barat	241.60 km	17 550
7	Merbau	1.348.91 km	14 264
8	Pulau merbau	380.40 km	15 068
9	Tasik Puteri Puyu	551.00 km	16 426

Sumber data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Meranti 2017.²⁴

²⁴ <https://merantikab.bps.go.id/dynamictable/2017/06/12/50/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-di-kabupaten-kepulauan-meranti-2010-2017.html>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Meranti

Visi kabupaten kepulauan meranti adalah menjadikan kabupaten kepulauan meranti sebagai kawasan niaga yang maju dan unggul dalam tuntutan masyarakat madani.

Misi kabupaten kepulauan meranti yaitu :

- a. Mewujudkan penataan birokrasi pemerintahan yang efisien dan efektif
- b. Menurunkan tingkat kemiskinan melalui sewasembada hasil-hasil pertanian, perikanan dan peternakan.
- c. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat dalam rangka pengembangan ekonomi local.
- d. Meningkatkan sumber daya manusia dan produktifitas
- e. Meningkatkan insfrastruktur dasar dalam merangkai pulau, termasuk revitalisasi air bersih dan peningkatan elektrifikasi
- f. Mendorong infestasi dalam rangka menciptakan lapangan kerja dan penciptaan nilai tambah ekonomi
- g. Meningkatkan pembinaan mental sepiritual dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berakhlatul karimah.

2. Sejarah Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Kepulauan Meranti

Panwaslu dalam menjalankan tugas di bantu oleh seketariatan, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No 7 tahun 2017, untuk mendukung tugas dan wewenangnya, berdasarkan perinsip-prinsip pemilu dan peraturan perundang-undangan, sekretariat selalu berupaya semaksimal mungkin dalam menjalankan fungsinya yaitu mengerjakan hal-hal yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersifat teknis dalam menjalankan pengawasan pemilu. Pengawas pemilu adalah lembaga *ad hoc* atau sementara, yang dibentuk sebelum tahapan pertama pemilu, yaitu meliputi pendaftaran peserta pemilih, dimulai dan dibubarkan setelah calon yang terpilih dalam pemilu dilantik.

Dalam pelaksanaan pemilu tahun 1955 sama sekali tidak mengenal lembaga pengawas pemilu, lembaga pengawas pemilu baru muncul pada pemilu tahun 1982, yang dinamakan panwaslak, pembentukan lembaga panwaslak ini dilatar belakangi oleh banyaknya pelanggaran-pelanggaran dan manipulasi dalam pemilu yang dilakukan oleh petugas penyelenggara pemilu pada tahun 1971. Pada pemilu tahun 1977 pelanggaran dan kecurangan yang terjadi jauh lebih masif, atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi lantas direspon oleh pemerintah dan DPR yang didominasi oleh ABRI dan Golkar, maka munculah gagasan untuk memperbaiki dengan tujuan meningkatkan kualitas pada pemilu tahun 1971, demi memenuhi tuntutan PPP dan PDI pemerintah setuju untuk menempatkan wakil peserta pemilu kedalam kepanitiaan pemilu. Maka Pemerintah membentuk badan yang terlihat dalam urusan pemilu untuk mendampingi lembaga pemilihan umum, badan baru ini bernama panitia pengawas pelaksana pemilihan umum, dengan struktur dan fungsi dan mekanisme kerja yang baru, pengawas pemilu tetap diaktifkan untuk pemilu tahun 1999, kemudian badan ini berubah menjadi panitia pengawas pemilihan umum (panwaslu).

Panwaslu kab/kota bersifat *ad hoc* (sementara) dibentuk paling lambat satu bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan pemilu dimulai dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berakhir paling lambat dua bulan setelah seluruh tahapan pertama penyelenggaraan pemilu selesai, panwaslu kab/kota berkedudukan di Ibukota kabupaten/kota dalam hal ini di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Panwaslu Kabupaten Kepulauan Meranti terbentuk pada tanggal 13 september 2017, dalam rangka persiapan penyelenggaraan pilkada serentak putaran terakhir 27 juni 2018, anggota panwaslu Kabupaten Kepulauan Meranti terdiri dari 2 (dua) orang komisioner dan 1 (satu) orang ketua dari kalangan profesional yang bersifat *adhoc*, dan merangkap anggota, dipilih oleh anggota panwaslu Kabupaten/Kota itu sendiri, tanggal 14 oktober 2017 terbentuklah panwascam SeKabupaten Kepulauan Meranti setelah melalui proses pensleksian yang diselenggarakan oleh panwas Kabupaten Kepulauan Meranti.

C. Visi dan Misi Panwaslu Kabupaten Kepulauan Meranti

1. Visi

Terwujudnya pelaksanaan pemilihan umum yang profesional dan moderen, serta memiliki kemampuan yang tangguh untuk menegakkan keadilan dan kebenaran demi terwujudnya demokrasi yang jujur adil dan bersih.

2. Misi

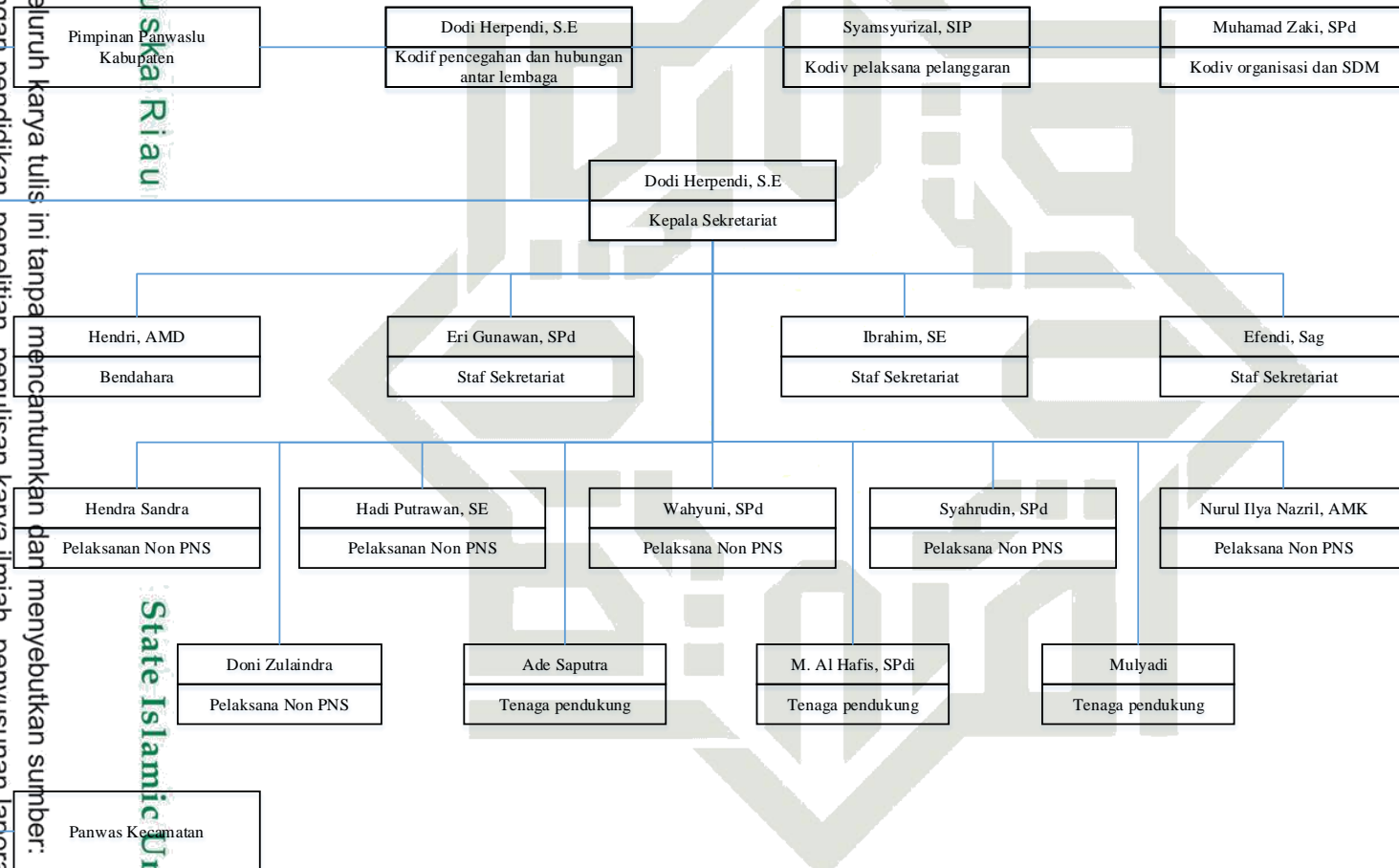
- a. mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu di Wilayah Kabupaten/Kota
- b. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan pemilu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan pemilu yang mengandung unsur tindak pidana
- d. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ditindak lanjuti
- e. meneruskan penemuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang
- f. menyampaikan laporan kepada Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu, oleh penyelenggara pemilu ditingkat Kabupaten/Kota
- g. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung
- h. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu
- i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.

D. Struktur Organisasi Panwaslu Kabupaten Kepulauan Meranti



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A Negara Hukum dan Demokrasi

Negara hukum dan demokrasi adalah mekanisme kekuasaan dalam menjalankan roda pemerintahan negara. kedua konsepsi tersebut saling berkaitan yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan, karena pada satu sisi demokrasi memberikan landasan dan mekanisme kekuasaan berdasarkan prinsip persamaan dan kesederajatan manusia, pada sisi yang lain negara hukum memberikan patokan bahwa yang memerintah dalam suatu negara bukanlah manusia, tetapi hukum.²⁵

Sedangkan menurut Stahl, negara hukum ditandai empat unsur pokok :

(1) pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, (2) negara berdasar pada teori trias politica, (3) pemerintah dilaksanakan berdasar undang-undang, dan (4) peradilan administrasi negara. berbagai perkembangan kemudian memunculkan *rechtsstaat*, dengan unsur kepastian hukum, persamaan, demokrasi, dan pemerintahan yang melayani kepentingan umum, konsep *rechtsstaat* di Eropa *Kontinental* sejak awal didasarkan pada filsafat liberal yang individualistik, maka ciri individualistik itu sangat menonjol dalam konsep negara hukum tersebut. di negara Anglo Saxon berkembang suatu konsep lain yang dipelopori AV. Dicey (Inggris), dengan nama *rule of law*, dengan tolok ukur supremasi hukum (*supremacy of law*), persamaan di depan

²⁵ Muntoha, *Demokrasi Dan Negara Hukum*, (Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Jurnal No. 3, Volume, 16 Juli 2009), H. 379

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum (*equality before the law*), dan konstitusi yang didasarkan atas hak-hak perseorangan (*the constitution based on individual rights*). perbedaan yang sangat menonjol *rechtsstaat* dan *rule of law* adalah pada konsep peradilan administrasi. ia sangat menonjol pada *rechtsstaat*, dan pada *rule of law* tidak diterapkan karena kepercayaan masyarakat yang besar kepada peradilan umum.

Dalam negara hukum, setiap pemerintahan baik dalam lapangan pengaturan maupun dalam lapangan pelayanan harus di dasarkan pada peraturan perundang-undangan, Seiring dengan itu pengertian asas legalitas juga berubah dan berkembang dari pemerintahan berdasar undang-undang (*wegamtigheid van bestuur*) menjadi pemerintahan berdasarkan hukum (*rechtmatigheid van bestuur*). Perubahan ini menunjukkan terjadinya perubahan nilai, negara hukum mengandung unsur pembatasan kekuasaan, karena prinsip pokok paham konstitusionalisme, yaitu pembatasan terhadap kekuasaan negara atau pemerintah. negara hukum ingin menegaskan bahwa penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan negara adalah hukum, yang prinsipnya senantiasa berkembang sesuai perkembangan masyarakat.²⁶

Demokrasi selalu menempatkan rakyat pada posisi yang sangat strategis dalam sistem ketatanegaraan, walaupun pada tataran implementasinya terjadi perbedaan antara negara yang satu dengan negara yang lain. Karena berbagai varian implementasi demokrasi tersebut, maka di dalam literatur kenegaraan dikenal beberapa istilah demokrasi yaitu demokrasi

²⁶ Sulaiman, *Epistomologi Negara Hukum*, (Semarang : Fakultas Hukum Universitas Semarang, Volume 2, No 1, 2016), h. 544-561

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi soviet, demokrasi nasional, dan lain sebagainya. semua konsep ini memakai istilah demokrasi, yang menurut asal kata berarti “rakyat berkuasa” atau *government or rule by the people* (kata Yunani *demos* berarti rakyat, *kratos/kratein* berarti kekuasaan/berkuasa).

Sementara itu, Sidney Hook memberikan definisi tentang demokrasi sebagai bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting atau arah kebijakan dibalik keputusan secara langsung didasarkan pada keputusan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat. hal ini berarti bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupan mereka, termasuk dalam menilai kebijaksanaan negara yang turut menentukan kehidupan mereka tersebut. oleh karena itu, demokrasi sebagai suatu gagasan politik di dalamnya terkandung 5 (lima) kriteria, yaitu : (1) persamaan hak pilih dalam menentukan keputusan kolektif yang mengikat; (2) partisipasi efektif, yaitu kesempatan yang sama bagi semua warga negara dalam proses pembuatan keputusan secara kolektif, (3) pembeberan kebenaran, yaitu adanya peluang yang sama bagi setiap orang untuk memberikan penilaian terhadap jalannya proses politik dan pemerintahan secara logis, (4) kontrol terakhir terhadap agenda, yaitu adanya keputusan eksklusif bagi masyarakat untuk menentukan agenda mana yang harus dan tidak harus diputuskan melalui proses pemerintahan, termasuk mendelegasikan kekuasaan itu pada orang lain atau lembaga yang mewakili masyarakat, dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(5) pencakupan, yaitu terliputnya masyarakat mencakup semua orang dalam kaitannya dengan hukum.

Demokrasi sebagai suatu gagasan politik merupakan paham yang universal sehingga didalamnya terkandung beberapa elemen sebagai berikut :

(1) Penyelenggara kekuasaan berasal dari rakyat (2) Setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggung jawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya (3) diwujudkan secara langsung maupun tidak langsung (4) rotasi kekuasaan dari seseorang atau kelompok ke orang atau kelompok yang lainnya, dalam demokrasi peluang akan terjadinya rotasi kekuasaan harus ada, dan dilakukan secara teratur dan damai (5) adanya proses pemilu, dalam negara demokratis pemilu dilakukan secara teratur dalam menjamin hak politik rakyat untuk memilih dan dipilih, dan (6) adanya kebebasan menikmati hak-hak dasar, dalam demokrasi setiap warga masyarakat dapat menikmati hak-hak dasarnya secara bebas, seperti hak untuk menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat²⁷

Pemerintahan Daerah dan Pemilihan Kepala Daerah

1. Pelaksanaan Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah kebebasan masyarakat setempat untuk mengatur dan mengurus kepentingan sendiri yang bersifat lokalitas untuk terselenggaranya kesejahteraan. dalam otonomi terdapat nilai yang hakiki, yakni nilai demokrasi dan prakarsa sendiri. Menurut Moh. Hatta, otonomisasi tidak saja berarti melaksanakan demokrasi, tetapi mendorong

²⁷ *Op.Cit*, h. 381-383

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkembangnya prakarsa sendiri, yang berarti pengambilan keputusan sendiri dan pelaksanaan sendiri untuk kepentingan masyarakat setempat. dengan demikian demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat dapat dicapai. rakyat tidak saja menentukan nasibnya sendiri, melainkan juga memperbaiki nasibnya sendiri. pelaksanaan pemerintahan daerah yang melibatkan partisipasi masyarakat luas memungkinkan terciptanya pemerintahan daerah yang demokratis dalam rangka menuju pada pemerintahan yang baik (*good governance*).²⁸

Undang-undang No. 32 tahun 2004 memberikan otonomi pada daerah untuk menggunakan sejumlah kewenangan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, penjelasan umum butir (1a) undang-undang No. 32 tahun 2004. yang termasuk otonom itu adalah daerah, bukan kepala daerah maupun DPRD, Daerah yang diberi otonomi itu berotonomi daerah, otonomi daerah adalah *input*, dalam pemberian otonomi kepada semua daerah yang didasarkan pada perimbangan.²⁹

Dalam undang-undang No. 32 Tahun 2014 terdiri dari cakupan materi yang lebih lengkap wewenang daerah. “Secara garis besar pada undang-undang itu disebutkan bahwa prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, yang dimaksud dengan otonomi yang

²⁸ Lukman Irwan, *Pelaksanaan Otonomi Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Good Governance Di Indonesia*, (Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Daerah, Volume 1, No 1 Juli 2008), h. 90

²⁹ Taliziduhu Nduha, *Kybernologi Sebuah Ilmu Pemerintahan*, (Jakarta : PT. Rienika Cipta, 2005), h. 195

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah. “daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.”³⁰

Menurut Djohermansyah Johan, urusan yang menjadi urusan kewenangan daerah yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan pelayanan dasar, sedangkan urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang terkait dengan potensi unggulan dan kekhasan daerah. urusan wajib pemerintahan yang diberikan kepada pemerintah daerah sebanyak 16 urusan pemerintahan itu berlaku sama baik bagi pemerintahan provinsi maupun pemerintahan kabupaten/kota, sedangkan yang membedakannya adalah sekala berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efesiensi.

Hadirnya Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menurut Muchlis Hamdi juga disebabkan oleh penguatan PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Leo berpendapat semangat otonomi Daerah dalam memberikan pelayanan mekanisme publik dan pengelolaan keuangan serta urusan lebih jelas, lebih lanjut dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014 mengatur beberapa pasal yang terperinci dan cukup lengkap. Salah satunya mengenai

³⁰ Tjahjo Kumolo, *Menelisik Sejarah Otonomi Daerah*, (Jakarta : Litbang Kemendagri, Volume 2, No 3, Juni 2017), h. 27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemilihan Kepala Daerah, Desa dan daerah pemekaran (daerah otonom baru).³¹

2. Pemerintahan Daerah

Dalam beberapa kajian tentang hukum pemerintahan daerah dijumpai bahwa pemerintahan daerah secara etimologi dalam bahasa Yunani *autos* yang berarti sendiri dan *nomous* yang berarti hukum atau peraturan, dalam buku sarundjang merujuk literatur Belanda dikatakan bahwa otonomi berarti pemerintahan sendiri (*zelfegeling*), yang oleh Van Vollenhoven dibagi atas *zelfwetgeving* (membuat undang-undang sendiri), *zelfuitvoering* (melaksanakan sendiri), *zelfrechtspreek* (mengadili sendiri), dan *zelfpolitie* (menindaki sendiri). Dengan demikian dapat dipahami pemerintahan adalah kewenangan sedangkan daerah adalah wilayah atau area, jadi pemerintahan daerah adalah wewenang pada suatu wilayah atau daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah atau daerah masyarakat itu sendiri mulai dari ekonomi, politik dan pertimbangan keuangan termasuk pengaturan sosial, budaya, dan ideologi yang sesuai dengan tradisi adat istiadat daerah lingkungannya.³²

Menurut ketentuan pasal 18 UUD 1945, bahwa dasar permusyawaratan atau perwakilan tidak hanya berada pada pemerintahan pusat, melainkan juga pada pemerintahan daerah, ketetapan pemerintahan daerah yang terdapat dalam undang-undang dasar tersebut memiliki dua nilai dasar unitaris dan desentralisasi teritorial, artinya kedaulatan yang

³¹ *Ibid*, h. 28

³² Abusamah, *Hukum Pemerintahan Daerah Dan Desa Di Indonesia*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2016), h. 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melekat pada rakyat, bangsa dan negara republik indonesia tidak akan terbagi diantara kesatuan-kesatuan pemerintahan.³³ apabila ditelaah dari sejarah pembentukan pasal 18 UUD 1945 Muh. Yamin lah yang pertama membahas masalah pemerintahan daerah dalam sidang BPUPKI 29 mei 1945, ia mengatakan “Negeri, Desa, dan segala persekutuan hukum adat yang dibaharui dengan jalan rasionalisme dan pembaharuan zaman, dijadikan kaki susunan sebagai bagian bawah, atara bagian atas dan bagian bawah dibentuk bagian tengah sebagai pemerintahan daerah untuk menjalankan pemerintahan urusan dalam, pengreh praja”.

Dalam undang-undang No. 32 Tahun 2004 ditegaskan bahwa pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya, hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan hubungan lainnya, yang menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antar susunan pemerintahan. dalam rangka penyelenggaraan hubungan kewenangan antara pemerintahan dan daerah, undang-undang No. 32 Tahun 2004 pasal 10 menegaskan, pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ini ditentukan menjadi urusan pemerintah. Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-

³³ *Ibid*, h. 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantunya, urusan pemerintahan yang mengurus pemerintahan pusat meliputi, hubungan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter fisik, dan agama.³⁴

Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah kepala daerah merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara demokratis melalui pilkada, Gubernur Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, untuk provinsi disebut wakil Gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati dan untuk kota disebut wakil wali kota., Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan. Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada

³⁴ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 362-363

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

3. Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan umum kepala daerah selanjutnya disebut pemilihan adalah pelaksana kedaulatan rakyat diwilah Provinsi, Kabupaten/Kota untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali Kota dan wakil wali Kota secara langsung dan demokrasi.³⁵

Pemilihan umum (pemilu) adalah peroses pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu, pemilu merupakan salah satu usaha untuk mempengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan rektorika, publik, relations, komunikasi massal dan melakukan kegiatan lainnya. Dalam Undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum disebutkan bahwa, pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, anggota dewan perwakilan Daerah, presiden dan wakil presiden, dan untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara kesatuan republik indonesia tahun 1945, dasar pelaksanaan pemilu pasal 18 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa pemerintahan Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.³⁶

³⁵ Pasal 1 Ayat 2 Perbawaslu No 22 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberi Keterangan Dalam Pelisihan Hasil Di Mahkamah Konstitusi

³⁶ Yatarullah, *Diktat Sistem Pemilu*, (Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau), h. 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perkembangan pemilihan umum langsung oleh rakyat dilakukan untuk membentuk lembaga yang melakukan pengawasan terhadap pemerintahan, hal itu dilakukan untuk membatasi kekuasaan, secara umum bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung itu lebih demokratis, pemilihan langsung dianggap perlu yaitu untuk lebih membuka pintu bagi tampilnya kepala daerah yang sesuai dengan kehendak rakyat dan untuk menjaga stabilitas pemerintahan.

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh rakyat menurut Ramlan Subekti secara substansi maupun tahapan pelaksanaannya merupakan pemilu (pemilihan umum), pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyebutkan, gubernur, bupati dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis, pasal 1 undang-undang No. 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur bupati dan walikota menyatakan bahwa yang selanjutnya disebut pemilu adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten Kota untuk memilih Gubernur Bupati dan Wali Kota secara langsung dan demokratis.³⁷

4. Dasar Hukum Pemilihan Umum Kepala Daerah

Pemilu adalah wujud nyata demokrasi prosedural, meskipun demokrasi tidak sama dengan pemilihan umum, namun pemilihan umum merupakan salah satu aspek demokrasi yang sangat penting yang juga harus diselenggarakan secara demokratis. oleh karena itu, lazimnya di negaranegara yang menamakan diri sebagai negara demokrasi

³⁷ *Op.Cit*, h. 129-135

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mentradisikan pemilu untuk memilih pejabat-pejabat publik dibidang legislatif dan eksekutif baik di pusat maupun daerah. demokrasi dan Pemilu yang demokratis merupakan “*qonditio sine qua non*”, *the one can not exist without the others*. Dalam arti bahwa pemilu dimaknai sebagai prosedur untuk mencapai demokrasi atau merupakan prosedur untuk memindahkan kedaulatan rakyat kepada kandidat tertentu untuk menduduki jabatan-jabatan politik.³⁸

Dalam demokrasi indonesia masyarakat berhak, bahkan wajib berpolitik untuk menentukan haluan negara, membuat undang-undang dan mengawasi pelaksanaan kekuasaan negara. hukum dibentuk sesuai dengan hasil proses politik didalam masyarakat. setelah hukum dibentuk dalam wujud undang-undang maka setiap orang harus tunduk padanya.³⁹ dari pada itu maka dibutuhkan kontrol dalam melaksanakannya. Sosial kontrol (*social control*) diartikan sebagai suatu proses yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan, yang bersifat mendidik, mengajak bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi hukum, kaidah dan nilai yang berlaku, perwujudan sosial kontrol berupa penerapan peraturan perundang-undangan.⁴⁰

Dasar hukum pemilihan kepala daerah langsung adalah:

- a. Undang – undang Dasar 1945, pasal 18 ayat (4) Gubernur Bupati Dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota.

³⁸ Nanik Prasetyoningsih, *Dampak Pemilihan umum Serentak Bagi Pembangunan Demokrasi Indonesia*, (Jogyakarta : Jurnal Vol. 21 No .2 Desember 2014), h. 243

³⁹ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005), h. 34

⁴⁰ *Ibid*, h. 22

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Undang Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- c. Undang-undang No. 8 tahun 2015 perubahan atas undang-undang No. 1 tahun 2015 tentang penerapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang No. 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota. pasal 3 ayat (1) pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak diseluruh wilayah negara kesatuan republik indonesia.
- d. Undang-undang No. 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang No. 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang No. 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang.
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 4 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan umum No. 3 Tentang Tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017.
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 5 tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan umum No. 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pentingnya Peranan dan Pengawasan

1. Pengertian Peran

Peran merupakan perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu, seorang pemimpin didalam organisasi mempunyai peranan setiap pekerjaan membawa serta harapan bagaimana penanggung peran berperilaku.⁴¹

Peran adalah aktor, dalam konteks sosial peran diartikan sebagai suatu fungsi yang dibawakan oleh seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur.⁴²

Teori peran (Role Theory) adalah teori yang merupakan perpaduan antara teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Selain dari psikologi, teori peran berawal dari sosiologi dan antropologi, dalam ketiga ilmu tersebut, istilah “peran” diambil dari dunia teater. dalam teater, seorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Posisi actor dalam teater (sandiwara) itu kemudian dianalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat. Sebagaimana halnya dalam teater, posisi orang dalam masyarakat sama dengan posisi aktor dalam teater, yaitu bahwa perilaku yang diharapkan daripadanya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam kaitan dengan adanya orang-orang lain yang berhubungan dengan

⁴¹ Veithzal Rivai, Deddy Mulyadi, *Kepemimpinan dan Prilaku Organisasi*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), h. 156

⁴² <http://digilib.uinsby.ac.id/18163/5/Bab%202.pdf>, di Akses Pada Tanggal 14 Maret 2020, Jam 16:01, h. 22

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang atau aktor tersebut, dari sudut pandang inilah disusun teori-teori peran.⁴³

Selain itu, Kahn et al, juga mengenalkan teori peran pada literatur perilaku organisasi. Mereka menyatakan bahwa sebuah lingkungan organisasi dapat mempengaruhi harapan setiap individu mengenai perilaku peran mereka.⁴⁴

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa, peran adalah aktor yang dijalankan seorang didalam organisasi untuk menjalankan tugas dan kewajiban yang melekat padanya.

2. Pengertian Pengawasan

Koontz berpendapat bahwa pengawasan adalah untuk melakukan pengukuran dan tindakan atas kinerja yang berguna untuk meyakinkan organisasi secara obyektif dan merencanakan suatu cara dalam mencapai tujuan organisasi. selanjutnya secara sederhana disebutkan bahwa pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan agar visi, misi atau tujuan organisasi tercapai dengan lancar tanpa ada penyimpangan atau segala usaha dan kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan kegiatan apakah yang sesuai dengan semestinya atau tidak.⁴⁵

⁴³ Gartiria Hutami dan Anis Chariri, *Pengaruh Konflik Peran dan Ambiguitas Peran Terhadap Komitmen Independensi Auditor Internal Pemerintah Daerah*, (Studi Empiris pada Inspektorat Kota Semarang), (Universitas Diponegoro), h. 5

⁴⁴ *Ibid*, h, 6

⁴⁵ Dede Sri Kartini, Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Padjajaran, *Jurnal*, Vol 2, No 2, 6 Desember 2017), h. 156

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Stephen Robein (1980), pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses mengikuti perkembangan kegiatan untuk menjamin jalannya pekerjaan, dengan selesai secara sempurna sebagaimana yang direncanakan dengan pengoreksian beberapa pemikiran yang saling berhubungan. Sondang Siagian mengatakan bahwa pengawasan adalah peroses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Arifin Abdurahman (1960) mengatakan bahwa ada beberapa faktor membantu pengawasan dan mencegah berbagai kasus penyelewengan serta penyalahgunaan wewenang, yaitu (a) Filsafat yang dianut oleh suatu bangsa, (a) agama yang mendasari, (c) kebijakan yang dijalankan, (d) anggaran pembiayaan, (e) penempatan pegawai dan prosedur kerja, (f) kemantapan koordinasi dalam organisasi.⁴⁶

Menurut Griffin bahwa proses pengawasan memiliki empat dasar tahapan yaitu : (a). *Establish standards*, dengan menetapkan kembali target atau program yang berikut untuk perbandingan yang membawa kinerja terukur, standar pengawasan inipun selalu konsisten terhadap tujuan organisasi. (b). *Measurement performance*, ukuran kinerja yang tetap, kegiatan yang terus menerus pada sebagian besar organisasi, untuk suatu pengawasan yang efektif ukuran kinerja harus benar atau sah, harian, mingguan atau bulanan, penampilan ukuran pelayanan dari suit Post, kualitas produk dan jumlahnya, penampilan pekerja sering diukur antara

⁴⁶ Inu Kencana Syafie, *Ilmu Pemerintahan*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2014), h. 130-131

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mutu dan jumlah terhadap hasil. (c). *Compare performance Grains standar*, membandingkan kembali kinerja dengan standar, mungkin kinerja lebih tinggi, atau lebih rendah atau sama dengan standar. (d). *Consider corrective action*, keputusan untuk mengambil tindakan yang berat, manajer memerlukan analisis dan keahlian *diagnostik*, meneliti tingkat penyimpangan atau merubah standar atau ukuran atau norma.

Pengawasan merupakan sebuah aspek penting dalam manajemen aparatur negara agar segala tugas, fungsi, dan program-program yang dijalankan pemerintah dapat berjalan sebagaimana mestinya. fungsi pengawasan juga sangat berpengaruh terhadap kinerja karena dalam proses pengawasan dapat mengendalikan pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan.⁴⁷

Pengawasan merupakan unsur penting dalam proses manajemen pemerintahan, pengawasan memiliki peran yang sangat strategis untuk terwujudnya akuntabilitas publik dalam pemerintahan dan pembangunan melalui suatu kebijakan pengawasan yang komprehensif dan membina, maka diharapkan kemampuan terutama dibidang kontrol pengawasan, dapat ditingkatkan kepastiannya dalam rangka membangun infrastruktur birokrasi yang lebih kompetitif.⁴⁸

⁴⁷ *Op.Cit*, h. 156-157

⁴⁸ Abdul Haris, *Fungsi Pengawasan Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai Inspection of Inspectorate Of Serdang Bedagai Regency*, (Jurnal Administasi Publik, Vol 6, 2016), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tinjauan Umum tentang Panitia Pengawas Pemilu

1. Pengawasan Pemilihan Umum

Pengawasan pemilu adalah kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa dan menilai proses penyelenggara pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengawasan penyelenggaraan pemilu dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, panwaslu kabupaten Kota, panwaslu Kecamatan, panwaslu lapangan dan panwaslu luar negeri.⁴⁹ Menurut Stoner dan Freeman yang dikutip oleh Wasistiono dan Yonatan dikatakan bahwa pengawasan merupakan proses untuk menjamin suatu kegiatan sesuai dengan rencana kegiatan. Harrop dan Miller menyatakan secara lengkap “pemilu adalah sebuah preferensi ekspresi formal yang diatur untuk kemudian ditampung dan ditransformasikan kedalam sebuah keputusan kelompok tentang siapa yang akan memerintah apakah ada pergantian dalam kepemimpinan pemerintahan atau tidak”.

Sedangkan Heywood menyatakan “Pemilu menyediakan bagi masyarakat kesempatan formal yang paling jelas untuk memengaruhi proses politik, dan juga membantu secara langsung atau tidak langsung, untuk menentukan siapa yang akan memegang kekuasaan pemerintahan”. Sehubungan pemilu adalah aktivitas formal yang dibiayai negara, maka

⁴⁹ Ahmad Sukarja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta : Sinar Afika, 2012), h. 162

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lembaga-lembaga yang terlibat juga formal, untuk Indonesia, lembaga pelaksana adalah KPU dan lembaga pengawas adalah Bawaslu.⁵⁰

2. Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu)

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian Panitia adalah kelompok orang yang ditunjuk atau dipilih untuk mempertimbangkan atau mengurus hal-hal yang ditugaskan kepadanya.⁵¹ sedangkan pengertian pengawasan menurut Sondang Siagian mengatakan bahwa pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan dan kegiatan.⁵² sedangkan pemilu (pemilihan umum) adalah melaksanakan kedaulatan rakyat dan melaksanakan hak asasi warga Negara untuk menentukan jalannya negara.⁵³

Berdasarkan pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, panwaslu adalah kelompok orang yang ditunjuk untuk mengurus hal-hal yang ditugaskan kepadanya dalam proses pengamatan dan pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk menjamin hak-hak warga negara dalam pemilu. Panwaslu memiliki tugas mengawasi penyelenggaraan pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu untuk mewujudkan pemilu yang demokratis. Kewenangan panwaslu sangat dilematis dituntut untuk menjadi instrumen dalam menegakkan pemilu yang jujur dan berkeadilan melalui tugas dan kewenangannya, akan tetapi jangkauan yang dimiliki panwaslu sangat terbatas sebagai lembaga yang hanya mengantarkan perkara-perkara kepada lembaga lain.

⁵⁰ *Op.Cit*, h. 151-156

⁵¹ <https://kbbi.web.id/panitia>, Di Unduh Pada Hari Sabtu Tanggal 22 Juni 2019, Jam

09:19 Wib

⁵² *Op. Cit*. h. 130-131

⁵³ Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta : Raja PT Grafindo Persada, 2012), h. 420

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Panwaslu Kabupaten/kota beranggotakan tiga orang diangkat dengan keputusan bawaslu provinsi melalui seleksi ketat hal tersebut demi keutuhan dan kemurnian penyelenggaraan pilkada. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota.⁵⁴

3. Dasar Hukum Terbentuknya Panwaslu Kabupaten Kota dan Tugas Wewenang

Tugas dan wewenang secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan suatu organisasi. setiap pegawai seharusnya melaksanakan kegiatan yang lebih rinci yang dilaksanakan secara jelas dan dalam setiap bagian atau unit. Rincian tugas-tugas tersebut digolongkan kedalam satuan praktis dan konkrit sesuai dengan kemampuan dan tuntutan.

Dasar hukum panitia pengawas Kabupaten/Kota dan tugas wewenangnya sebagai berikut :

- a. Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 1 tahun 2016 tentang pembentukan, pemberhentian dan pergantian antar waktu badan pengawas pemilihan umum Provinsi, panitia pengawas pemilihan umum Kabupaten/Kota, panitia pengawas

⁵⁴Budi Evantri Sianturi, *Penguatan Kelembagaan Panwas Pemilihan Dalam Menyelesaikan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah*, (Jurnal Law Reform Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 12, Nomor 2, Tahun 2016), h. 188

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemilihan umum Kecamatan, panitia pemilihan umum lapangan dan pengawas pemilihan umum luar negeri.

- b. Berdasarkan undang-undang No. 10 Tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota, pasal 30 yaitu, Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi :

- 1) Pelaksanaan pengawasan rekrutmen PPK (panitia pemilihan kecamatan), PPS (panitia pemungutan suara), dan KPPS (kelompok penyelenggara pemungutan suara)
- 2) Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap
- 3) Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan
- 4) Proses dan penetapan calon
- 5) Pelaksanaan kampanye
- 6) Perlengkapan pemilihan dan pendistribusiannya
- 7) Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilihan
- 8) pelaksanaan pengawasan pendaftaran pemilih
- 9) Mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara;
- 10) Penyampaian surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK
- 11) Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi, Kabupaten, dan Kota dari seluruh Kecamatan
- 12) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan Pemilihan susulan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13) Proses pelaksanaan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota

- a. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan
- b. Menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana
- c. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk ditindak lanjuti
- d. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang
- e. Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan oleh penyelenggara di Provinsi, Kabupaten, dan Kota
- f. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sekretaris
- g. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan, dan
- h. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran panwaslu Kabupaten Kepulauan Meranti dalam mengawasi penyelenggaraan pilkada Riau 2018 berdasarkan Undang-undang No. 10 tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota adalah melaksanakan pengawasan hanya secara administrasi, sedangkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tugas dan wewenang panwaslu memiliki hak pengawasan yang luas meliputi pengendalian pada keseluruhan pengendalian plkada yang kewenangannya terbatas, dengan berkordinasi bersama KPU Kabupaten, hanya menerima laporan dan merekomendasikan temuan pelanggaran. dalam perakteknya belum berjalan dengan maksimal disebabkan oleh lemahnya kinerja panwaslu dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. salah satunya dapat dilihat dari temuan-temuan pelanggaran yang ada selama penyelenggaraan pilkada Riau 2018 di Kabupaten Kepulauan Meranti terutama dalam mengawasi pengawasan rekrutmen KPPS yang hanya sebagi pengoreksi kesalahan dari lembaga KPU Kabupaten sebagai pelaksanaan rekrutmen.
2. Adapun faktor penghambat panwaslu Kabupaten Kepulauan Meranti dalam mengawasi penyelenggaraan pilkada Riau 2018 berdasarkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

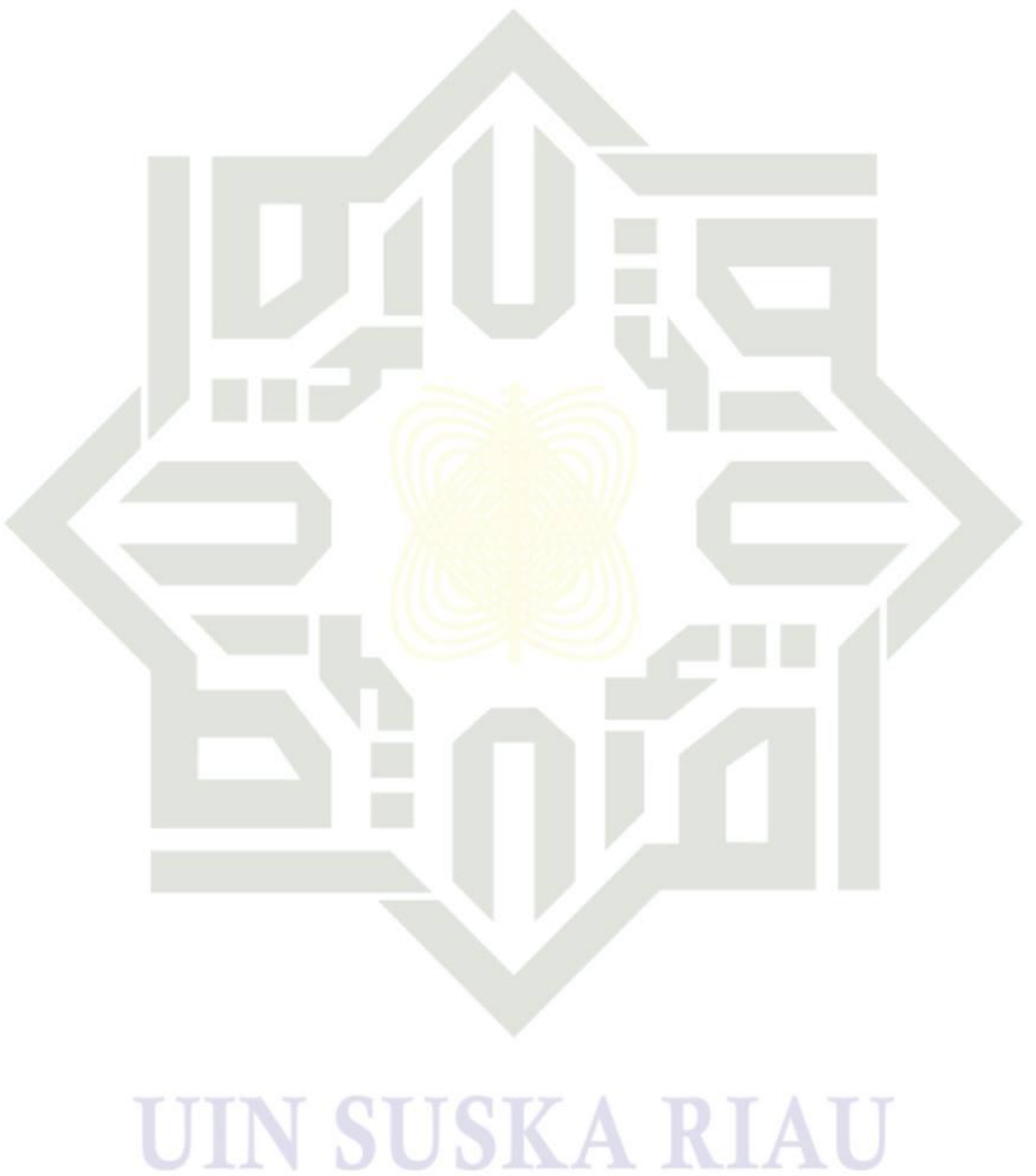
undang-undang No 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur bupati dan wali kota diantaranya yaitu : (a) lemahnya aturan perundang-undangan, (b) sumber daya manusia, (c) terbatasnya anggaran, (d) keadaan Geografi dan penunjang kerja, dan (e) kurangnya kesadaran peserta pilkada dan pemilih.

B. Saran

Berdasarkan penelitian penulis, maka adapun saran yang dapat penulis berikan yaitu :

1. Ketua panitia panitia panwaslu Kabupaten Kepulauan Meranti selaku panitia pengawas dalam mengawasi tahapan penyelenggaraan, terutama dalam mengawasi penyelenggaraan pilkada Riau 2018 di Kabupaten Kepulauan Meranti, harus lebih berperan aktif baik secara langsung maupun tidak langsung lebih inofatif dan lebih oktimal dalam melakukan arahan kepada jajaranya, menjalin kerja sama yang baik dan saling besinegritas agar terlaksananya tugas dan wewenang sebagai lembaga pengawas pemilu, harus memsosialisasikan aturan lebih persuasif kepada jajaran pnwaslu secara maksimal sehingga dapat mengurangi pelanggaran-pelanggaran dalam mengawasi penyelenggaraan pilkada.
2. Selain saran untuk panwaslu Kabupaten Kepulauan Meranti, juga untuk pemerintah selaku pembuat aturan diharapkan lebih tegas dan mudah sesederhana mungkin dalam membuat aturan maupun perundang-undangan terutama dalam hal peran lembaga panwaslu. Karna dalam

penindakan ataupun sanksi yang lemah tidak akan dapat memberikan efek yang baik bagi perbaikan kinerja dalam mengawasi penyelenggaraan pilkada.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi Diindonesia*, Yogyakarta : pustaka pelajar, 2011.
- Abdul Haris, *Fungsi Pengawasan Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai Inspection fonction of Inspectorate Of Serdang Bedagai Regency*, Jurnal Administasi Publik, Vol 6, 2016.
- Abusamah, *Hukum Pemerintahan Daerah Dan Desa Di Indonesia*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2016.
- Achmad Arifullah, *Pelaksanaan Pilkada Serentak Yang Demokrasi Damai Dan Bermartabat*, Volume I, No 2 mei-Agustus 2005.
- Ahmad Sukarja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012.
- Budi Evantri Sianturi, *Penguatan Kelembagaan Panwas Pemilihan Dalam Menyelesaikan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah*, Jurnal Law Reform Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 12, Nomor 2, Tahun 2016.
- Dede Sri Kartini, Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Padjajaran, Jurnal, Vol 2, No 2, 6 Desember 2017.
- Firdaus, *Pancasila*, Riau : Suska Perss, 2010.
- Herry Febriadi, *A'adl*, Volume X No. 1, Januari 2018.
- Cartiria Hutami dan Anis Chariri, *Pengaruh Konflik Peran dan Ambiguitas Peran Terhadap Komitmen Independensi Auditor Internal Pemerintah Daerah, (Studi Empiris pada Inspektorat Kota Semarang)*, Universitas Diponegoro.
- <http://www.Bawaslu.Go.ID/profilbawaslu/sejarahpengawasanpemilu/Tbidfaultaspx> . Diakses pada hari Rabu 28 maret 2019.
- <https://kbbi.web.id/panitia>, Di Unduh Pada Hari Sabtu Tanggal 22 Juni 2019, Jam 00:19 Wib.
- <https://merantikab.bps.go.id/dynamictable/2017/06/12/50/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-di-kabupaten-kepulauan-meranti-2010-2017.html>
- <https://news.detik.com/kolom/d-3961500/dilema-pendanaan-pilkada>, Diakses pada tanggal 21 Maret 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<http://digilib.uinsby.ac.id/18163/5/Bab%202.pdf>, di Akses Pada Tanggal 14 Maret 2020, Jam 16:01.

Imu Kencana Syafiie, *Ilmu Pemerintahan*, Jakarta : Bumi Aksara, 2014.

Shaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Bandung : Alfabeta Bandung, 2017.

Imly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta : Raja PT Grafindo Persada, 2012.

Imly Ashadiqi, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta : Rajawali Pers, 2012.

_____, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Jakarta : Sekeretariat Jendral Dan Kepaniteraan MK, 2006.

Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia Konsolidasi pasca Orde Baru*, Jakarta :Kencana prenada Media Group, 2010.

Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta : Paradogma, 2010.

Lukman Irwan, *Pelaksanaan Otonomi Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Good Governence Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Daerah, Volume 1, No 1 Juli 2008.

M Ilham F Putra, *Politik Hukum Perundang-undangan Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Produk Legislasi*, Jurnal Hukum, Volume 1 No 3 Desember 2012.

Mahfud Md, *Politik hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta : Bumi Aksara, 2004.

Muhaddam Izbolo Dan Teguh Ilham, *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Perss, 2015.

Muntoha, *Demokrasi Dan Negara Hukum*, Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Jurnal No. 3, Volume, 16 Juli 2009.

Nanik Prasetyoningsih, *Dampak Pemilihan Umum Serentak Bagi Pembangunan Demokrasi Indonesia*, Jogyakarta : ajurnal Vol. 21 No .2 Desember 2014.

Nematul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 362-363

_____, *Ilmu Negara*, Jakarta : Rajawali Perss, 2010.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 1 Ayat 2 Perbawaslu No. 22 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberi Keterangan Dalam Pelisihan Hasil Di Mahkamah Konstitusi

Pasal 166 ayat (1) Undang-undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati Dan Walikota

Pasal 7 peraturan badan pengawasan pemilihan umum republik indonesia No. 1 tahun 2016 tentang pembentukan, pemberhentian dan pergantian antar waktu badan pengawas pemilihan umum Provinsi, panitia pengawas pemilihan umum Kabupaten/Kota, panitia pengawas pemilihan umum Kecamatan, panitia pemilihan umum lapangan dan pengawas pemilihan umum luar negeri

Ratnia Sholihah Dkk, *Jurnal Wancana Politik*, Volume 3, No. 1 Maret 2018 : 14-28.

Sulaiman, *Epistomologi Negara Hukum*, Semarang : Fakultas Hukum Universitas Semarang, Volume 2, No. 1, 2016.

Sandu Siyoto dan Adi Sodik, *Dasar Metode Penelitian*, Yogyakarta : Literasi Media Publishing, 2015.

Sumber Data : Dokumentasi Diambil Dari Kasubag Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, 5 maret 2019

Taliziduhu Nduha, *Kybernologi Sebuah Ilmu Pemerintahan*, Jakarta : PT. Rienika Cipta, 2005.

Tjahjo Kumolo, *Menelisik Sejarah Otonomi Daerah*, Jakarta : Litbang Kemendagri, Volume 2, No. 3, Juni 2017.

Undang-undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubenur Bupati dan Walikota

Veithzal Rivai, Deddy Mulyadi, *Kepemimpinan dan Prilaku Organisasi*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010.

Viktor, M Situmorang, Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Aparatur Pemerintahan*, Jakarta : Rienika Cipta, 1998.

Widhi Novianto, *Telaah Isu-Isu Strategi Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*, Jakarta : Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara, 2015.

Yatarullah, *Sistem Pemilu*, Pekanbaru : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2015.

Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005.

DOKUMENTASI



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul *"PERAN PANWASLU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI DALAM MENGAWASI PENYELENGGARAAN PILKADA RIAU 2018 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR BUPATI DAN WALIKOTA"* yang ditulis oleh :

Nama : Arifin Pitoyo
NIM : 11427103834
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 10 Maret 2020
Waktu : 13.30 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Maret 2020 M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Firdaus, SH., MH

Sekretaris
Muslim, S.Ag.,SH.,M.Hum

Penguji I
Ilham Akbar, SHL,SH.,MH

Penguji II
Dr. H. Abu Samah, MH

Kepala Bagian Tata Usaha
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag
NIP. 19750801 200701 1023

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM
كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Simpang Baru Pantan Pekanbaru 28293 Pk. Bkt. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id E-mail : rektor@uin-suska.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : Un.04/F.LPP.01.1/1886/2019

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ARIFIN PITOYO
NIM : 11427103834
Jurusan : ILMU HUKUM

Telah Lulus :

UJIAN KOMPREHENSIF

Yang diselenggarakan pada tanggal : 25 FEBRUARI 2019

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya

Pekanbaru, 1 Maret 2019
Dekan,



Drs. H. Hajar, M.Ag
NIP. 195807121986031005

1. Hak cipta milik UIN Suska Riau
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
 - a. Dilarang mengutip, menyalin, atau menjiplak seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web: www.fasih.uin-suska.ac.id Email: fasih@uin-suska.ac.id

: Un. 04/F.I/PP.00.9/1851/2019
: Biasa
: 1 (Satu) Proposal
: Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 01 Maret 2019

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: ARIFIN PITOYO
NIM	: 11427103834
Jurusan	: Ilmu Hukum S1
Semester	: X (Sepuluh)
Lokasi	: Kantor panwaslu kabupaten kepulauan meranti

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
: Peran panwaslu kabupaten kepulauan meranti dalam mengawasi penyelenggaraan pilkada
riau 2018 berdasarkan undang-undang No 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur bupati
dan walikota

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Rector
Dean

Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
NIP. 19580712 198603 17005

embusan :
lektor UIN Suska Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 P.O. Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : rektor@uin-suska.ac.id

BERITA ACARA SEMINAR USUL PENELITIAN

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. NAMA | : Arifin Pitoyo |
| 2. NOMOR MAHASISWA | : 11427103834 |
| 3. JUDUL USUL PENELITIAN | : Peran panwaslu kabupaten kepulauan meranti dalam mengawasi pilkada riau 2018 berdasarkan uu no 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, walikota |
| 4. Hari/Tgl. Diseminarkan | : Selasa / 22 Januari 2019 |
| 5. Hasil Seminar dirumuskan adalah | : |
| a. Judul | : Disetujui / Ditolak / Disempurnakan |
| b. Latar Belakang Masalah | : Jelas / Masih Kabur / Perlu Perbaikan |
| c. Permasalahan | : Jelas / Masih Kabur / Dirumuskan kembali agar menjadi jelas |
| d. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | : Jelas / Mengambang / Perlu Perbaikan |
| e. Kerangka Teoritis (jika ada) | : Jelas / Kurang Jelas / Perlu Disempurnakan |
| f. Rumusan Hipotesis (jika ada) | : Cukup Tajam / Perlu Dipertajam |
| g. Metode Penelitian | : Jelas / Masih Kabur / Perlu Perbaikan |
| h. Daftar Pustaka | : Cukup / Belum untuk mendukung pemecahan masalah yang diteliti |

Demikianlah keputusan Tim Seminar disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk selanjutnya disampaikan kepada Dekan / Wakil Dekan !

NARASUMBER

Dr. H. Mohd. Yunus, MA

Catatan :

Perubahan Judul dalam Seminar
Dikonsultasikan dengan WD I

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562032 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak cipta milik UIN Suska Riau

PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Proposal dengan judul Peran panwaslu kabupaten kepulauan meranti dalam mengawasi penyelenggaraan pilkada riau 2018 berdasarkan undang-undang No 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur bupati dan walikota, ditulis oleh saudara:

Nama : Arifin Pitoyo
Nim : 11427103834
Program Studi : Ilmu Hukum
Diseminarkan pada :
Hari / Tanggal : Selasa / 22 Januari 2019
Narasumber : Drs.H. Mohd Yunus, M.Ag

Telah diperbaiki sesuai dengan saran nasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kepala Sub Bagian Akademik

Asfendi, S. Ag, M. Si
NIP. 196109181988031002

Pekanbaru, 6 Februari 2019
Narasumber

Drs. H. Mohd Yunus, M.Ag
NIP.195912311987031037

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id Kode Pos : 28126



182010

REKOMENDASI

Nomor : 803/DPMTSP/NON IZIN-RISET/19437
TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04.F.IPP.00.9/1851/2019 Tanggal 1 Maret 2019, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

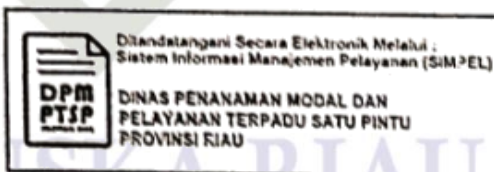
1. Nama : ARIFIN PITOYO
2. NIM / KTP : 11427103834
3. Program Studi : ILMU HUKUM
4. Jenjang : S1
5. Alamat : PEKANBARU
6. Judul Penelitian : PERAN PANWASLU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI DALAM MENGAWASI PROSES PENYELENGGARAAN PILKADA RIAU 2018 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR BUPATI DAN WALIKOTA
7. Lokasi Penelitian : KANTOR BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Dengan Ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan ini.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini dan terima kasih.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 1 Maret 2019



Tembusan :
Disampaikan Kepada Yth :
1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kepulauan Meranti
3. Kepala DPMTSP dan Tenaga Kerja di Selatpanjang
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
Yang bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penguasaan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id Kode Pos : 28126



REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/19437
TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un/04/F.I/PP.00.9/1851/2019 Tanggal 1 Maret 2019, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

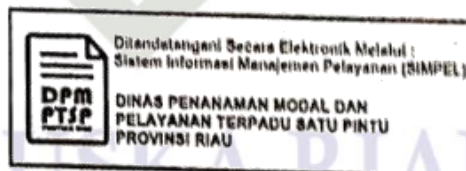
1. Nama : ARIFIN PITOYO
2. NIM / KTP : 11427103834
3. Program Studi : ILMU HUKUM
4. Jenjang : S1
5. Alamat : PEKANBARU
6. Judul Penelitian : PERAN PANWASLU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI DALAM MENGAWASI PROSES PENYELENGGARAAN PILKADA RIAU 2018 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR BUPATI DAN WALIKOTA
7. Lokasi Penelitian : KANTOR BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Dengan Ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan ini.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini dan terima kasih.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 1 Maret 2019



Disampaikan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kepulauan Meranti
3. Up. Kepala DPMTSP dan Tenaga Kerja di Selatpanjang
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang Bersangkutan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
 Jalan Johari Dagang Komplek Perkantoran Bupati, Telp/ Fax. (0763) 33630
 E-Mail : dprnptsptkmeranti@gmail.com
SELATPANJANG

Kode Pos 28753

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 053/DPMPTSP/III/2019/SKP/034

TENTANG :

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti, setelah membaca surat dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/19437, tanggal 01 Maret 2019 dengan ini memberikan rekomendasi penelitian kepada :

Nama	: Arifin Pitoyo
NIM	: 11427103834
Program Studi	: Ilmu Hukum
Jenjang	: S1
Alamat	: Pekanbaru
Judul Penelitian	: Peran Panwaslu Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Mengawasi Proses Penyelenggaraan Pilkada Riau 2018 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
Lokasi Penelitian	: Kantor Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal surat keterangan ini dibuat.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini diberikan, agar dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak terkait, diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Penelitian ini, terima kasih.

Dibuat di : Selatpanjang
 Pada tanggal : 05 Maret 2019

A.n. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 DAN TENAGA KERJA
 KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
 SEKRETARIS

H. FEBRIADY, S.Si, Apt
 Pembina Tk. I (IV/b)
 NIP. 19710206 200112 1 002

Tembusan Disampaikan Kepada Yth.:

1. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti;
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau;
3. Yang Bersangkutan;
4. Arsip;



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

Jl. Pembangunan 1 No... Selatpanjang Kota
No Hp. 081276763167/081276763167

Selat Panjang, 12 Maret 2019

Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal

: 008/RII-10/KP.01.00/10/2019
: Biasa
: -
: Keterangan Riset

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
dan Hukum UIN Sulthan
Syarif Kasim Riau
di-
Pekanbaru

Sehubungan dengan Surat Keterangan Penelitian Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, Nomor 053/DPMPTSP/III/2018/SKP/034 tentang pelaksanaan kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Sripsi, Tanggal 05 Maret 2019, dengan ini Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Kepulauan Meranti menerangkan bahwa :

Nama : Arifin Pitoyo
NIM : 11427103834
Jurusan : Ilmu Hukum
Strata : S-1
Alamat : Jln, Swakarya, Gg Emas, Kecamatan Tampan. Kota Pekanbaru

Benar telah melakukan penelitian di Kantor Sekretariat Panwaslu Kabupaten Kepulauan Meranti berkaitan dengan Skripsi yang berjudul "Peran Panwaslu Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pilkada Riau 2018 Berdasarkan Undang-Undang No.10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota"

Demikian Surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

UIN SUSKA RIAU



1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 - a. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BIOGRAFI PENULIS

Arifin Pitoyo, bertempat lahir di Anak Setatah Kec. Rangsang Barat, Kab. Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, pada tanggal 26 November 1994. Anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan ayahanda Bambang Supriadi dan ibunda Nelmida.

Penulis sendiri berdarah Jawa dan Minang Kabau yang didapat dari kedua orang tua. Riwayat pendidikan yang telah ditempuh penulis sebagai berikut, menyelesaikan pendidikan SDN 019 Anak Setatah tahun 2007, menyelesaikan pendidikan SMPN 01 Peranggas tahun 2010, dan menyelesaikan pendidikan SMAS PEMDA Kec. Rangsang Barat tahun 2013. Kemudian, penulis berhijrah ke beberapa daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau berkerja sebagai buruh. Setelah itu, pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, mengambil jurusan Ilmu Hukum dengan Konsentrasi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Hukum. Dalam masa perkuliahan penulis telah melaksanakan PKL di Kabag Tata Pemerintahan dan Kabag Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kab. Kepulauan Meranti, dan juga telah melaksanakan KKN di Desa Minas Timur Kecamatan Minas Kab. Siak. Penulis melaksanakan penelitian yang berjudul “Peran Panwaslu Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pilkada Riau 2018 Berdasarkan UU No, 10 tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati Dan Walikota” lulus sebagai Sarjana Hukum setelah di Munasqasyahkan dengan hasil sangat memuaskan pada hari selasa tanggal 10 Maret 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.